



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Permasalahan dalam Implementasi *Local Currency Settlement*
Indonesia-Malaysia (2018–2021)

Skripsi

Oleh

Gabriella Permana

6091901083

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Permasalahan dalam Implementasi *Local Currency Settlement*
Indonesia-Malaysia (2018–2021)

Skripsi

Oleh

Gabriella Permana

6091901083

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

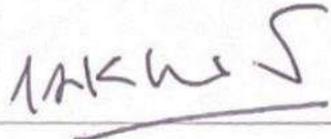
Nama : Gabriella Permana
Nomor Pokok : 6091901083
Judul : Permasalahan dalam Implementasi *Local Currency Settlement*
Indonesia-Malaysia (2018–2021)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 3 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

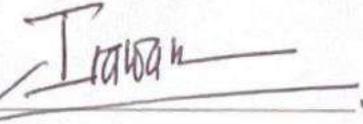
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

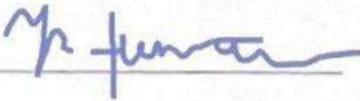
Sekretaris

Dr. Adelbertus Irawan J. H., Drs., M.A.

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D:

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Gabriella Permana
Nomor Pokok Mahasiswa : 6091901083
Program Studi : Hubungan Internasional
Pembimbing : Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. (19900182) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Senin tanggal 3 July 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Beberapa Kendala dalam Implementasi Local Currency Settlement Indonesia-Malaysia (2018-2021)
Judul (Bahasa Inggris) : Challenges in the Implementation of Indonesia-Malaysia Local Currency Settlement (2018-2021)

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi **(Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case)**

Judul (Bahasa Indonesia) Konsistensi antara judul, pertanyaan, dan tujuan penelitian.

Judul (Bahasa Inggris)

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :
Konteks hambatan perlu diperjelas.

3. Perbaikan di Bab 1 Di KP: perlu ada tambahan soal kebijakan Moneter

4. Perbaikan di Bab 2 Penggunaan Currency Power bisa jadi dasar penjelasan Bab 2 selain stabilitas politik

5. Perbaikan di Bab 3

6. Perbaikan di Bab 4 Judul bab 4 seharusnya mencerminkan jawaban RQ.
Fokus pada sektor unggulan yang berkontribusi pada penggunaan LCS kedua negara.

7. Perbaikan di Bab 5

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 3 July 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_hi.fisip@unpar.ac.id
7/6/2023 10:14:40

Marshell Adi Putra, S.IP., MA.

Penguji,

pakpahan@unpar.ac.id
7/3/2023 10:53:01

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

Penguji (Pembimbing),

irawanaj@unpar.ac.id
7/6/2023 10:01:43

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.
A.

Penguji,

purwadi@unpar.ac.id
7/3/2023 10:51:39

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gabriella Permana
NPM : 6091901083
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Permasalahan dalam Implementasi *Local Currency Settlement*
Indonesia-Malaysia (2018–2021)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 Juni 2023



Gabriella Permana

Abstrak

Nama : Gabriella Permana

NPM : 6091901083

Judul : Permasalahan dalam Implementasi *Local Currency Settlement*
Indonesia-Malaysia (2018–2021)

Penelitian ini membahas terkait sejumlah permasalahan yang mengakibatkan kurang diminatinya penggunaan mata uang lokal pada transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2018 hingga 2021, meskipun sudah difasilitasi oleh kerangka kerja sama *local currency settlement* atau LCS—yakni kerangka kerja sama yang seharusnya mendorong penggunaan rupiah dan ringgit pada tingkat internasional, dan bukan sebaliknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori *currency power*, kerja sama moneter internasional, serta konsep LCS yang kemudian dirumuskan ke dalam empat faktor penentu keberhasilan dari kerja sama penggunaan mata uang lokal untuk memfasilitasi transaksi perdagangan internasional, yaitu penggunaan mata uang yang didasarkan pada pilihan ekonomis eksportir, adanya sistem kliring dan penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal, *spread* dari masing-masing mata uang lokal yang tidak terlalu besar, dan bahwa mata uang tersebut harus sudah digunakan dengan cukup luas pada tingkat internasional. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa dari keempat faktor tersebut, kerangka kerja sama LCS antara Indonesia dan Malaysia belum berhasil memenuhi tiga faktor. Pertama, penggunaan mata uang pada kerja sama LCS tidak didasarkan pada pilihan ekonomis eksportir. Kedua, *spread* rupiah dan ringgit yang masih terlalu besar, dan ketiga, yaitu kurangnya penggunaan rupiah dan ringgit pada tingkat internasional. Oleh karena itu, walaupun kerangka kerja sama LCS antara Indonesia dan Malaysia sudah memiliki sebuah sistem kliring dan penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal, tidak terpenuhinya ketiga faktor tersebut menjadi permasalahan yang mengakibatkan kurang diminatinya penggunaan rupiah dan ringgit pada transaksi perdagangan bilateral Indonesia dan Malaysia, meskipun sudah difasilitasi oleh kerangka kerja sama LCS.

Kata kunci: Indonesia-Malaysia, rupiah-ringgit, kerangka kerja sama LCS, transaksi perdagangan internasional, kerja sama moneter

Abstract

Nama : Gabriella Permana

NPM : 6091901083

Judul : Problems in the Implementation of Indonesia-Malaysia Local Currency Settlement (2018–2021)

This research discusses the constraints that caused the use of local currencies in bilateral trade transactions between Indonesia and Malaysia from 2018 to 2021 to be less favored, despite having the local currency settlement (LCS) framework to facilitate the transaction process—which was aimed to increase the use of rupiah and ringgit at the international level, and not the other way around. The research employs the currency power and international monetary cooperation theory, as well as the LCS concept which are formulated into four determinants of the success of local currency cooperation in facilitating international trade transactions. These determinants include ensuring that the chosen currency is based on exporters' economic choice, the existence of a clearing and settlement system, moderate spreads of each local currency, and ensuring that the currency is widely used at the international level. Findings from this research indicates that the Indonesia-Malaysia LCS framework has not met three of these factors. Firstly, the currencies used in this cooperation are not based on exporters' economic choice. Secondly, the spreads of the rupiah and ringgit are still too large. Lastly, both currencies have not been widely used internationally. Hence, despite having a clearing and settlement system specifically for transactions using local currencies, the failure to meet the other three factors poses constraints that result in the limited adoption of the rupiah and ringgit in Indonesia and Malaysia's bilateral trade transactions, despite being facilitated by the LCS framework.

Keywords: *Indonesia-Malaysia, rupiah-ringgit, LCS framework, international trade transactions, monetary cooperation*

Kata Pengantar

Dengan rendah hati dan penuh rasa syukur kepada Tuhan, penulis menyampaikan kata pengantar ini sebagai bagian dari penulisan skripsi yang berjudul “**Permasalahan dalam Implementasi *Local Currency Settlement* Indonesia-Malaysia (2018–2021)**”. Skripsi ini sendiri dibuat untuk memenuhi kewajiban penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk menemukan alasan-alasan di balik rendahnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, meskipun sudah difasilitasi oleh kerangka kerja sama *local currency settlement* (LCS) yang notabene dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, sehingga menyederhanakan pekerjaan para pelaku perdagangan internasional. Besar harapan penulis bahwa penelitian ini nantinya akan berkontribusi dan memberikan manfaat bagi studi Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Politik Internasional.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan kritik, saran, dan masukan konstruktif dari pembaca untuk melengkapi penelitian ini, serta untuk menjadi bekal bagi perbaikan penelitian di masa mendatang.

Bandung, 20 Juni 2023

Gabriella Permana

Ucapan Terima Kasih

Skripsi ini merupakan hasil dari perjuangan dan dedikasi yang telah penulis lakukan selama empat tahun sebagai mahasiswi dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses penulisan skripsi ini, yang terus mendukung penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat mengapresiasi kehadiran dari pihak-pihak ini selama periode pengerjaan skripsi, dan hendak menyatakan rasa syukur dan terima kasih penulis terhadap pihak-pihak tersebut, yaitu:

Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan hikmat yang Ia berikan. Ia menjadi sumber kekuatan penulis untuk melalui proses panjang ini, dan kata-kata tidak akan mampu mengekspresikan perasaan syukur penulis atas penyertaan-Nya tidak hanya dalam proses penulisan skripsi ini, melainkan juga sepanjang hidup penulis.

Kepada orang tua penulis, Mami dan Papi, yang senantiasa memberikan dukungan, baik dukungan materi maupun imateri kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan hingga merampungkan jenjang S1. Terima kasih atas cinta dan dukungan yang tidak pernah habis diberikan untuk penulis, dan senantiasa menjadi tempat bagi penulis untuk pulang.

Kepada adik penulis, Clairine, *thank you for always listening, for always being there. For always attempting to understand—despite the age difference, and for always attempting to be a company and to put a smile on my face, even during the hardest days. And most importantly, thank you for always looking up to me, believing in me, and convincing me (indirectly, because you will never say these things to my face) that I am indeed the coolest and that I can get through anything life throws at me.*

Kepada sahabat-sahabat penulis selama kuliah—Chrisa, Ariel, Tsabita, Valerie, Calista, Seva, Dinda, Rizqie, dan Jacinda. *Whether I met you on my very first day or on my very last, thank you for being a friend, for making my college experience what it is today.* Terima kasih karena selalu percaya, selalu ada, selalu setia mendengarkan, dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan penulis bahwa *this too shall pass*. Terima kasih telah menjadi sosok-sosok yang menginspirasi penulis untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

To my home team—Gabriel, Ivonni, Chyntia, Agnes, Stefani, dan Jessica. Thank you for never leaving, no matter how long, no matter how far. See you all again very soon!

Kepada Livia dan Levina, terima kasih karena selalu siap sedia untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan menghibur penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih karena selalu bersedia untuk memberikan ruang bagi penulis untuk bernafas, dan selalu memberikan dukungan bagi penulis.

Last but not least, to myself. Thank you for not giving up, no matter how hard it gets. It was not easy, but you did it—and you will always do.

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	v
Daftar Bagan, Gambar, dan Tabel	vii
Daftar Akronim	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	11
1.4 Kajian Pustaka.....	11
1.5 Kerangka Teori.....	16
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	29
1.6.1 Metode Penelitian	29
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
1.7 Sistematika Penulisan.....	31
BAB II: URGENSI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENINGKATKAN PENGGUNAAN MATA UANG LOKAL	33
2.1 Urgensi Indonesia dalam Meningkatkan Penggunaan Mata Uang Lokal	33
2.2 Urgensi Malaysia dalam Meningkatkan Penggunaan Mata Uang Lokal	41
2.3 Kerja Sama dalam Bidang Perdagangan dan Moneter antara Indonesia dan Malaysia	48
2.3.1 Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Bidang Perdagangan.....	50
2.3.2 Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Bidang Moneter.....	52

BAB III: KERANGKA KERJA SAMA <i>LOCAL CURRENCY SETTLEMENT</i>	55
3.1 Latar Belakang Pembentukan Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i>	55
3.2 Tujuan Pembentukan Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i>	58
3.3 Fitur-fitur Utama dalam Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i>	62
3.3.1 Fleksibilitas dalam <i>Foreign Exchange Administration</i>	63
3.3.2 Penunjukan Bank-bank Umum sebagai <i>Bank Appointed Cross Currency Dealer</i>	64
3.3.3 Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan.....	66
3.3.4 Pembentukan Perjanjian Swap Mata Uang Lokal Secara Bilateral.....	67
3.4 Mekanisme Penyelesaian Transaksi Perdagangan dalam Kerangka Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i>	69
BAB IV: PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KERJA SAMA <i>LOCAL CURRENCY SETTLEMENT</i> INDONESIA-MALAYSIA (2018–2021)	74
4.1 Perkembangan Kerangka Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i> Indonesia dengan Malaysia.....	74
4.2 Pelaksanaan Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i> Indonesia dengan Malaysia	82
4.3 Permasalahan dalam Implementasi Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i> Indonesia-Malaysia.....	84
4.3.1 Sistem Kliring dan Penyelesaian Transaksi yang Tidak Sempurna	85
4.3.2 Penggunaan Mata Uang Tidak Didasarkan pada Pilihan Ekonomis dari Eksporir.....	96
4.3.3 <i>Spread</i> Rupiah dan Ringgit yang Masih Terlalu Besar	105
4.3.4 Kurangnya Penggunaan Rupiah dan Ringgit pada Tingkat Internasional	112
4.4 Peluang dalam Implementasi Kerja Sama <i>Local Currency Settlement</i> Indonesia-Malaysia.....	123
BAB V: KESIMPULAN	126
Daftar Pustaka.....	130

Daftar Bagan, Gambar, dan Tabel

Bagan 1.1 Faktor Penentu Keberhasilan Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Memfasilitasi Transaksi Perdagangan Internasional.....	27
Bagan 4.1 Proses Penyelesaian Transaksi Perdagangan dalam Kerangka Kerja Sama LCS IDR-MYR	88
Bagan 4.2 Visualisasi Penggunaan Kurs Jual dan Beli dalam Kegiatan Jual-Beli Mata Uang.....	106
Gambar 3.1 Mekanisme Penyelesaian Transaksi Perdagangan dengan LCS.....	71
Gambar 3.2 Perbandingan Proses Konversi Mata Uang dalam Penyelesaian Transaksi Perdagangan Menggunakan USD dan LCS.....	72
Tabel 4.1 Persentase Penggunaan LCS pada Transaksi Perdagangan Indonesia dengan Malaysia Tahun 2017–2021 (Ribuan USD).....	82
Tabel 4.2 Bank-bank Umum yang Ditunjuk sebagai Bank ACCD dalam Kerja Sama LCS Indonesia-Malaysia.....	91

Daftar Akronim

1MDB	1Malaysia Development Berhad
ACCD	Appointed Cross Currency Dealer
AS	Amerika Serikat
ASA	ASEAN Swap Arrangement
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BI	Bank Indonesia
BNM	Bank Negara Malaysia
BOT	Bank of Thailand
BPPU	Blueprint Pengembangan Pasar Uang
CMI	Chiang Mai Initiative
CMIM	Chiang Mai Initiative Multilateralization
CORE	Center of Reform on Economics
FEA	Foreign Exchange Administration
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GPEI	Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
IDR	Indonesian Rupiah
JPKI	Jaring Pengaman Keuangan Internasional
LCBSA	Local Currency Bilateral Swap Agreement
LCS	Local Currency Settlement
LCS IDR-MYR	Local Currency Settlement Indonesia-Malaysia
Migas	Minyak dan gas
MYR	Malaysian Ringgit
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
Sub-SNA	Sub-Special Non-Resident Account
USD	United States Dollar
WITS	World Integrated Trade Solution

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perekonomian global telah melihat sejumlah perubahan dalam sistem moneter internasional. Adapun sistem moneter internasional dimulai dengan *gold standard*, yaitu penggunaan emas murni sebagai alat tukar resmi dalam perdagangan. Pada sistem ini, berat dan jumlah emas menentukan nilai tukar dari mata uang suatu negara.¹ Sistem *gold standard* pada awalnya diadopsi oleh Inggris, dan kemudian turut diadopsi oleh negara-negara lain seperti Prancis dan Amerika Serikat (AS) pada abad ke-19. Dominasi Inggris dalam perekonomian internasional pada masa itu menjadi salah satu faktor pendorong utama pengadopsian *gold standard* oleh berbagai negara di dunia.

Sistem *gold standard* kemudian mengalami kemunduran seusai Perang Dunia I dan The Great Depression. Untuk menggantikan *gold standard*, sistem internasional kemudian mengadopsi sistem moneter baru yang dikenal dengan sebutan Bretton Woods System. Apabila sistem *gold standard* menggunakan emas murni sebagai penentu nilai tukar mata uang, Bretton Woods System menggunakan dolar AS (USD) sebagai penentu nilai tukar. Nilai USD sendiri ditentukan

¹ Barry J. Eichengreen, *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System* (Princeton: Princeton University Press, 2008), 5.

berdasarkan cadangan emas murni yang dimiliki oleh AS. Adapun nilai tukar yang ditetapkan adalah 35 USD untuk setiap satu ons emas.²

Dengan menjadikan USD sebagai penentu nilai tukar mata uang negara-negara lain, AS mengemban tanggung jawab yang besar untuk memelihara stabilitas perekonomiannya. Apabila perekonomian AS mengalami gangguan, maka perekonomian global akan turut merasakan dampaknya. Hal ini kemudian menjadi kenyataan pada peristiwa Nixon Shock yang terjadi pada tahun 1971. Untuk menghadapi inflasi, Richard Nixon, Presiden AS yang menjabat pada masa itu membatalkan konvertibilitas internasional USD terhadap emas secara sepihak.³ Akibatnya, Bretton Woods System pun berakhir dan digantikan oleh sistem nilai tukar mengambang atau *floating exchange rate*. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan dengan mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut relatif dengan mata uang lain.⁴ Sistem inilah yang kemudian digunakan sebagai sistem moneter internasional hingga saat ini.

Meskipun telah meninggalkan Bretton Woods System, hingga saat ini, USD masih menjadi mata uang utama yang digunakan dalam perekonomian internasional. Hampir seluruh kegiatan ekonomi, baik perdagangan internasional, bisnis, maupun investasi asing dilakukan dengan menggunakan USD. Bahkan, USD juga digunakan sebagai mata uang pada aktivitas ekonomi bilateral,

² Sandra Kollen Ghizoni, "Nixon Ends Convertibility of U.S. Dollars to Gold and Announces Wage/Price Controls," Federal Reserve History, 22 November 2013, <https://www.federalreservehistory.org/essays/gold-convertibility-ends#:~:text=August%201971>.

³ *Ibid.*

⁴ Barry J. Eichengreen, *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System* (Princeton: Princeton University Press, 2008), 131.

multilateral, ataupun regional yang tidak melibatkan AS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi nilai USD yang stabil, besarnya perekonomian AS, serta dominasi geopolitik AS pada sistem internasional.⁵ Selain itu, besarnya pengaruh AS dalam institusi-institusi keuangan internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank juga semakin memperkuat posisi USD sebagai mata uang internasional.

Akan tetapi, ketergantungan terhadap USD juga mendatangkan berbagai kerugian. Penggunaan USD sebagai mata uang utama, terutama dalam kegiatan ekonomi yang tidak melibatkan AS, membuat negara-negara lebih rentan untuk terpengaruh kebijakan ataupun permasalahan yang melanda perekonomian AS. Selain itu, transaksi menggunakan USD mengakibatkan inefisiensi karena dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengonversikan mata uang negara asal ke USD, dan kemudian mengonversikan USD ke mata uang negara tujuan. Tak hanya itu, konversi yang dilakukan secara berulang kali juga meningkatkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Di sisi lain, penggunaan USD secara terus menerus juga mengakibatkan USD menguat dan melemahkan mata uang lokal, dan berakibat pada meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan dalam aktivitas ekonomi. Hal-hal ini menjadi suatu ancaman bagi stabilitas perekonomian negara, karena ketergantungan terhadap mata uang dari negara lain meningkatkan kerentanan negara terhadap fluktuasi mata uang tersebut. Akibatnya, kemungkinan negara untuk terkena dampak dari krisis menjadi lebih besar, dan stabilitas perekonomian nasional terus-menerus terancam.

⁵ Anshu Siripurapu, "The Dollar: The World's Currency," Council on Foreign Relations, 29 September 2020, <https://www.cfr.org/background/dollar-worlds-currency>.

Indonesia adalah salah satu negara yang menyadari hal tersebut dan memutuskan untuk mencari solusi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap USD. Solusi yang ditemukan adalah dengan bergabung dan menandatangani kerja sama *local currency settlement* (LCS), kerja sama bilateral untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional. Kerja sama yang dipelopori oleh bank sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM) dan bank sentral Thailand, Bank of Thailand (BOT) ini dinilai sesuai dengan kepentingan Indonesia untuk mengurangi ketergantungannya terhadap USD. Lebih menarik lagi, kerja sama ini mendorong penggunaan mata uang lokal sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional, menggeser dominasi USD pada perdagangan. Hal ini dinilai dapat semakin menguntungkan kedua negara, karena dengan mendorong penggunaan rupiah dan ringgit pada tingkat internasional, maka posisi kedua mata uang pada ranah moneter internasional juga berpotensi untuk menguat. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Desember 2016, bank sentral Indonesia, Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman untuk turut bergabung dan menjalin kerja sama LCS secara bilateral, baik dengan BNM maupun BOT.⁶ Setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama LCS antara Indonesia dengan kedua negara pun diresmikan setahun setelahnya, yaitu pada 11 Desember 2017 dan mulai efektif diimplementasikan pada tanggal 2 Januari 2018.⁷

⁶ “Bilateral MoUs on Local Currency Settlement Framework between Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia and the Bank of Thailand - Bank Negara Malaysia,” Bank Negara Malaysia, 23 Desember 2016, <https://www.bnm.gov.my/-/bilateral-mous-on-local-currency-settlement-framework-between-bank-indonesia-bank-negara-malaysia-and-the-bank-of-thailand>.

⁷ “Bank Indonesia Committed to Local Currency Settlement in ASEAN Region,” Bank Indonesia, 16 April 2019, <https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-Indonesia->

Gubernur BI pada masa itu, Agus Martowardojo, menyebutkan bahwa tujuan utama dari penandatanganan kerja sama LCS oleh BI adalah untuk mendorong diversifikasi mata uang pada kegiatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara mitra.⁸ Bagi Indonesia sendiri, kerangka kerja sama LCS merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kerja sama moneter dengan negara-negara mitra untuk mempertahankan stabilitas keuangan nasional.⁹ Oleh karena itu, dalam konteks ini, kerangka kerja sama LCS diharapkan dapat mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap USD.¹⁰ Dengan demikian, harapannya stabilitas nilai tukar rupiah dapat dipelihara, dan stabilitas keuangan nasional secara keseluruhan dapat dipertahankan.

Tak hanya itu, kerja sama LCS juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara mitranya.¹¹ Dengan konversi langsung, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses konversi lebih singkat karena ada langkah yang dihilangkan, yakni proses konversi dari mata uang lokal ke USD, ataupun sebaliknya. Biaya yang dikeluarkan juga akan berkurang karena konversi hanya dilakukan sebanyak satu kali, yaitu dari mata uang lokal yang satu ke mata uang lokal yang lain tanpa harus melalui USD. Hal ini diharapkan

Terus-Berkomitmen-Dukung-Implementasi-Penggunaan-Local-Currency-Settlement-di-Kawasan-ASEAN.aspx.

⁸ Yudono Yanuar, "Indonesia, Malaysia, Thailand Kurangi Pemakaian Dolar, Kenapa?," *Tempo*, 11 Desember 2017, <https://bisnis.tempo.co/read/1041296/indonesia-malaysia-thailand-kurangi-pemakaian-dolar-kenapa>.

⁹ Ita Vianty, "Kerja Sama Keuangan Internasional Bank Indonesia: Jaring Pengaman Keuangan Internasional dan Local Currency Settlement," *Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional*, no. 4 (2018): 119–22, 119.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, ed., "Gubernur BI Yakin Transaksi Local Currency Settlement Tahun Ini Naik 10 Persen," *Tempo*, 16 Februari 2022, https://bisnis.tempo.co/read/1561500/gubernur-bi-yakin-transaksi-local-currency-settlement-tahun-ini-naik-10-persen?page_num=3.

dapat mendorong pelaku ekonomi internasional untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional dengan negara mitra, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap USD. Kemudian, selain untuk mendorong diversifikasi mata uang dan meningkatkan efisiensi perdagangan, LCS juga dinilai mendatangkan sejumlah keuntungan lain, seperti mendorong tumbuhnya pasar uang dalam negeri dengan menggunakan mata uang lokal.¹² Di sisi lain, kerja sama LCS juga berpotensi untuk mempermudah akses pelaku ekonomi lokal ke pasar internasional.¹³ Hal ini memungkinkan pelaku ekonomi dalam negeri untuk turut berpartisipasi secara aktif pada ranah perekonomian internasional, dan menguntungkan tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi juga perekonomian negara secara keseluruhan.

Dengan segala keuntungan yang ditawarkan, kerja sama LCS menjadi suatu kerangka kerja sama yang begitu menarik bagi berbagai negara, namun terutama bank sentral dari negara tersebut. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa keuntungan-keuntungan tersebut hanya dapat dirasakan apabila kerja sama ini berlangsung sesuai dengan harapan. Jika pelaksanaan dari kerja sama ini benar-benar berhasil, kerja sama LCS dapat menjadi suatu terobosan baru di tengah sistem perekonomian internasional yang telah didominasi USD selama bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, komitmen dan eksekusi dari masing-masing pihak yang terlibat menjadi faktor penentu utama dari keberhasilan kerja sama ini.

¹² Ita Vianty, "Kerja Sama Keuangan Internasional Bank Indonesia: Jaring Pengaman Keuangan Internasional dan Local Currency Settlement," *Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional*, no. 4 (2018): 119–22, 120.

¹³ *Ibid.*

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Malaysia merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Secara global, selama beberapa tahun ke belakang, Malaysia selalu termasuk ke dalam jajaran sepuluh besar mitra dagang utama Indonesia, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun negara asal impor. Oleh karena itu, kesempatan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dengan Malaysia tentunya tidak disia-siakan oleh Indonesia, dan begitu juga sebaliknya—BNM dengan senang hati menyambut BI dalam kerja sama LCS. Dengan eratnya hubungan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, kerangka kerja sama LCS dinilai mampu mendatangkan hasil akhir yang—secara teoretis—dapat memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, meskipun digadang-gadang sebagai sebuah kerangka kerja sama yang dapat mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional, nyatanya hal tersebut belum tercermin pada data perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia.

Branko Windoe, Senior Executive Vice President Treasury & International Banking dari Bank Central Asia—selaku salah satu Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) yang memfasilitasi transaksi LCS Indonesia dengan negara-negara mitra—menyebutkan bahwa penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan masih menghadapi sejumlah masalah.¹⁴ Permasalahan ini sendiri dapat dilihat dari rendahnya persentase penggunaan mata uang lokal pada

¹⁴ Branko Windoe, LCS Banyak Keunggulan, Tapi Transaksinya Masih Kurang Sosialisasi, interview by Anneke Wijaya and Putu Agus Pransuamitra, *CNBC Indonesia*, 22 Februari 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=qNePv79qgiw>.

transaksi perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra, termasuk dengan Malaysia—meskipun sudah difasilitasi oleh kerja sama LCS. Pada wawancaranya dengan CNBC Indonesia, Windoe menyebutkan bahwa hingga tahun 2021, rata-rata penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia baru mencapai angka di bawah 5%.

Angka ini juga menimbulkan suatu tanda tanya besar. Meskipun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, angka ini masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan volume transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Meskipun sempat mengalami kenaikan, angka-angka ini hanya mencakup sebagian kecil dari transaksi perdagangan antara kedua negara, dan mengindikasikan bahwa alih-alih mengurangi ketergantungan kedua negara terhadap USD, kerja sama ini justru berjalan dengan stagnan selama empat tahun terakhir. Lantas, hal ini mengundang berbagai pertanyaan berkenaan dengan masih rendahnya penggunaan mata uang lokal oleh Indonesia dengan Malaysia, meskipun sudah difasilitasi kerangka kerja sama LCS yang seharusnya dapat mempermudah proses transaksi perdagangan internasional dalam rupiah dan ringgit. Angka yang rendah ini memberikan impresi bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi kerangka kerja sama LCS oleh para pelaku perdagangan internasional yang bersangkutan. Hal ini sangat disayangkan, karena secara teoretis, kerangka kerja sama LCS dinilai dapat membawa keuntungan yang begitu besar bagi negara-negara yang mengimplementasikannya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat memberikan hasil pembahasan yang komprehensif, maka terdapat sejumlah pembatasan yang diberlakukan dalam penelitian ini. Pertama-tama, pembahasan terkait kerja sama LCS pada penelitian ini difokuskan pada penggunaan kerangka kerja sama LCS dalam memfasilitasi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Maka dari itu, penelitian ini tidak menyentuh ranah investasi ataupun bentuk transaksi lain yang ditawarkan oleh kerja sama LCS di luar fitur-fitur yang berkaitan dengan perdagangan bilateral. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas kerja sama LCS yang terjalin di antara negara-negara lain, kecuali beberapa negara yang disinggung untuk melengkapi informasi yang disajikan di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, aktor yang menjadi fokus pada penelitian ini hanyalah Indonesia dan Malaysia—terutama bank sentral dari kedua negara, yakni BI dan BNM, sebagai aktor-aktor yang memainkan peranan penting dalam kerja sama ini. Secara spesifik, isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah isu terkait permasalahan yang mengakibatkan rendahnya penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia—khususnya jika dibandingkan dengan total perdagangan bilateral di antara kedua negara—meskipun sudah difasilitasi oleh kerangka kerja sama LCS.

Sementara itu, batasan tahun yang menjadi fokus dari penelitian adalah tahun 2018 hingga 2021. Pemilihan batasan tersebut didasari oleh kerja sama LCS Indonesia dengan Malaysia yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 2 Januari 2018. Adapun jangka waktu selama empat tahun dinilai sebagai jangka

waktu yang cukup ideal untuk melihat perkembangan dari kerja sama LCS, baik dalam hal ekspansi kebijakan maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu, jangka waktu ini juga sekiranya cukup untuk mengidentifikasi permasalahan yang berakibat pada rendahnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional antara Indonesia dengan Malaysia, meskipun sudah difasilitasi oleh kerangka kerja sama LCS.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Masalah yang menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam sebuah pertanyaan penelitian, yaitu **“Apa saja permasalahan dalam implementasi *local currency settlement* Indonesia-Malaysia (2018–2021)?”**

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terkait kerangka kerja sama LCS antara Indonesia dan Malaysia dan fitur-fiturnya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan bilateral antara kedua negara. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memberikan analisis mengenai permasalahan yang mengakibatkan rendahnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, meskipun sudah ada kerangka kerja sama LCS yang notabene ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah penggunaan rupiah dan ringgit dalam transaksi perdagangan antara Indonesia dan Malaysia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan komprehensif bagi pembaca mengenai kerja sama LCS antara Indonesia dan Malaysia, serta fitur-fitur yang ditawarkan oleh kerangka kerja sama ini dalam memfasilitasi perdagangan bilateral antara kedua negara. Selain itu, harapannya, penelitian ini juga dapat merumuskan permasalahan apa saja yang mengakibatkan rendahnya pelaksanaan kerja sama LCS Indonesia dan Malaysia, dan kemudian dapat dijadikan pertimbangan dan evaluasi bagi pelaku perdagangan internasional serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama ini. Terakhir, sekiranya informasi yang disajikan oleh penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan ke depannya.

1.4 Kajian Pustaka

Penelitian ini terlebih dahulu mengkaji tiga artikel jurnal dengan topik serupa. Artikel jurnal pertama berjudul “Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan *Local Currency Settlement (LCS) Framework* dalam Memfasilitasi Perdagangan”, ditulis oleh Aldy Nofansya dan Hasan Sidik.¹⁵ Dengan menggunakan sudut pandang Indonesia, Nofansya dan Sidik berpendapat bahwa kerja sama LCS dapat memperkuat perdagangan bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Dalam analisisnya, Nofansya dan Sidik kemudian menemukan bahwa terdapat perkembangan dari penggunaan LCS pada transaksi

¹⁵ Aldy Nofansya dan Hasan Sidik, “Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework Dalam Memfasilitasi Perdagangan,” *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 2 (12 Agustus 2022): 164–78, <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40478>.

perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand sejak LCS diluncurkan secara resmi pada akhir tahun 2017. Akan tetapi, perkembangan ini masih terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan total dari keseluruhan perdagangan bilateral Indonesia dengan kedua negara tersebut. Hingga November 2021, transaksi LCS antara Indonesia dengan Malaysia baru mencapai angka 3,0% dari total perdagangan kedua negara, dan 1,5% untuk transaksi LCS antara Indonesia dengan Thailand. Analisis yang dilakukan oleh Nofansya dan Sidik kemudian menemukan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan LCS, meliputi minimnya keterlibatan pelaku usaha, peran *stakeholder*, serta kurangnya komitmen negara penyelenggara.

Akan tetapi, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan, Nofansya dan Sidik menegaskan bahwa secara teoretis, kerja sama LCS dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peluang ini, diperlukan perbaikan dalam implementasi dari program LCS itu sendiri. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan peran *stakeholder*—dalam hal ini BI selaku bank sentral, serta Gugus Tugas Nasional LCS yang beranggotakan kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, diperlukan juga partisipasi aktif dari pelaku usaha, yaitu eksportir dan importir komoditas unggul untuk turut mengaplikasikan mekanisme LCS dalam bertransaksi. Hal ini dinilai dapat mempromosikan penggunaan LCS secara tidak langsung, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keuntungan yang dapat diberikan LCS dalam memfasilitasi perdagangan internasional.

Artikel jurnal kedua berjudul “Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand terhadap Kerjasama *Local Currency Settlement Framework* (LCS)” dan ditulis oleh Hadi Nur Muta’ali pada tahun 2020. Pada artikel jurnal ini, Muta’ali memaparkan hal-hal yang mendorong Indonesia untuk menandatangani pelaksanaan kerja sama LCS dengan Malaysia dan Thailand.¹⁶ Dalam penelitiannya, Muta’ali kemudian menemukan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong pengimplementasian kerja sama LCS oleh Indonesia. Pertama, ketiga negara memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD. Kedua, ketiga negara menilai bahwa kerja sama ini menguntungkan perdagangan internasional karena biaya *hedging* yang lebih rendah, sehingga menekan biaya yang perlu dikeluarkan untuk bertransaksi. Ketiga, kerja sama LCS juga memberikan kemudahan bertransaksi bagi sektor ritel di ketiga negara, karena dengan adanya kerja sama ini, masyarakat dapat bertransaksi dengan rupiah, ringgit, serta baht di mana saja dan dengan siapa saja. Terakhir, Muta’ali menilai bahwa investasi dengan mata uang lokal dapat mendorong investor dari ketiga negara untuk saling berinvestasi di negara-negara mitra. Hal ini terutama didorong oleh tingginya pemasukan asing dalam bentuk investasi langsung, serta pelemahan nilai USD yang kemudian meningkatkan nilai investasi dalam mata uang lokal.

Kemudian, Muta’ali menyimpulkan bahwa keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh kerja sama LCS dinilai sebagai hal-hal yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia dan hubungannya dengan negara-negara mitra. Dalam hal

¹⁶ Hadi Nur Muta’ali, “Kepentingan Indonesia Malaysia dan Thailand terhadap Kerjasama *Local Currency Settlement Framework* (LCS),” *e-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2020): 212–22.

perdagangan internasional, diperkirakan bahwa biaya *hedging* yang lebih rendah akan meningkatkan efisiensi perdagangan. Selain itu, kerja sama ini juga dinilai mendorong investasi asing, terutama sebagai alternatif investasi dan mendorong investor dari ketiga negara untuk saling berinvestasi di negara mitra. Dengan demikian, kerja sama LCS dinilai dapat memaksimalkan keuntungan dari kerja sama ekonomi antara ketiga negara tersebut.

Berbeda dengan kedua artikel jurnal sebelumnya, artikel jurnal ketiga menelaah kerja sama LCS yang dilakukan Indonesia bukan dengan Malaysia dan Thailand, melainkan dengan Tiongkok. Pada tulisannya yang berjudul “Kerjasama Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Melalui *Local Currency Settlement* (LCS)”, Mario Rizki memaparkan alasan-alasan terjalannya kerja sama LCS antara Indonesia dengan Tiongkok dari sudut pandang Indonesia.¹⁷ Dalam artikel jurnal yang diterbitkan pada tahun 2022 ini, Rizki menyebutkan bahwa terdapat empat alasan dijalannya kerja sama ini. Alasan pertama adalah posisi Tiongkok yang menduduki posisi pertama sebagai mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia. Kedua, Rizki menilai bahwa keinginan Indonesia untuk memperluas penggunaan rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap USD menjadi alasan lain yang mendorong dijalannya kerja sama ini. Kemudian, alasan ketiga adalah adanya kepentingan untuk mencapai visi dari *Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025*. Pemerintah mengharapkan bahwa dengan meningkatnya penggunaan mata uang lokal, maka volatilitas nilai tukar rupiah dapat dikurangi, dan mendorong berkembangnya pasar uang Indonesia.

¹⁷ Mario Rizki, “Kerjasama Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui *Local Currency Settlement* (LCS),” *JOM FISIP* 9, no. 2 (2022): 1–12.

Terakhir, Rizki menyebutkan bahwa kerja sama LCS dengan Tiongkok merupakan bentuk pelaksanaan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang sempat mengakibatkan PDB Indonesia menurun drastis dari 5,95 pada tahun 2019 menjadi 2,348 pada tahun 2020.

Sebagai penutup, Rizki menyimpulkan bahwa keempat hal tersebut merupakan alasan-alasan utama yang mendorong Indonesia untuk menjalin kerja sama LCS dengan Tiongkok. Alasan pertama dan kedua, yaitu posisi Tiongkok sebagai mitra dagang dan investasi utama Indonesia, serta keinginan Indonesia untuk meningkatkan penggunaan rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap USD menunjukkan bahwa kerja sama ini merupakan upaya pemenuhan kepentingan nasional oleh Indonesia, peningkatan efisiensi, dan mencegah munculnya permasalahan yang mengancam keamanan nasional. Alasan ketiga dan keempat, yaitu kepentingan Indonesia untuk mendorong perkembangan pasar uang nasional dan pemenuhan program PEN juga merupakan kepentingan nasional Indonesia yang dipenuhi melalui kerja sama internasional, dalam hal ini kerja sama LCS dengan Tiongkok.

Ketiga artikel jurnal di atas memberikan tiga perspektif berbeda mengenai kerja sama penggunaan mata uang lokal atau LCS. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nofansya dan Sidik memfokuskan pada perkembangan, tantangan, serta saran untuk memperbaiki pelaksanaan LCS ke depannya, sedangkan artikel jurnal yang ditulis oleh Muta'ali lebih menyoroti latar belakang yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kerja sama LCS dengan Malaysia dan Thailand. Di

sisi lain, artikel jurnal yang ditulis oleh Rizki menelaah kerja sama LCS antara Indonesia dengan negara mitra yang lain, yakni Tiongkok. Pada artikel jurnalnya, Rizki juga menganalisis faktor-faktor yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan kerja sama LCS dengan Tiongkok. Untuk penelitian ini sendiri, berbeda dengan ketiga artikel jurnal yang telah disebutkan sebelumnya, lebih menyoroti alasan di balik kurang diminatnya penggunaan mata uang lokal, meskipun telah difasilitasi oleh kerja sama LCS. Penelitian ini mengambil perspektif Indonesia dan Malaysia, dan secara spesifik hanya berfokus pada transaksi perdagangan antara kedua negara. Adapun penelitian ini mengacu pada tiga teori dan konsep, yaitu teori *monetary power*, kerja sama moneter internasional, serta konsep penggunaan mata uang lokal atau *local currency settlement*.

1.5 Kerangka Teori

Kebijakan moneter merupakan salah satu komponen penting dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Terlebih di tengah dunia yang didominasi oleh satu mata uang—yakni USD—sebagai alat pembayaran internasional, kebijakan moneter suatu negara turut menjadi objek penelitian dari studi hubungan internasional. Dalam bukunya yang berjudul *Currency Power: Understanding Monetary Rivalry*, Benjamin J. Cohen memaparkan bahwa kekuatan mata uang merupakan salah satu faktor yang menentukan *power* atau kekuatan suatu negara pada sistem internasional.¹⁸ Ketika mata uang suatu negara dijadikan mata uang internasional—dalam hal ini digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam

¹⁸ Benjamin J. Cohen, *Currency Power: Understanding Monetary Rivalry* (Princeton: Princeton University Press, 2018), 10–23.

kegiatan ekspor-impor, investasi, dan aktivitas ekonomi lainnya dalam tingkat internasional—maka mata uang tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang lainnya. Kenyataannya, semakin banyak transaksi yang bisa dilakukan dengan mata uang suatu negara, maka semakin kecil biaya yang harus dikeluarkan negara tersebut untuk melaksanakan aktivitas ekonominya. Tak hanya itu, selain mengurangi biaya transaksi, fenomena yang disebut sebagai internasionalisasi mata uang ini juga meningkatkan fleksibilitas negara dalam membentuk kebijakan—baik kebijakan domestik maupun luar negeri, memperkuat pengaruh negara dalam perekonomian internasional, dan meningkatkan reputasi negara tersebut dalam sistem internasional.

Keuntungan-keuntungan ini merupakan hak istimewa yang hanya dapat diperoleh oleh sebagian kecil negara yang mata uangnya digunakan sebagai mata uang internasional. Akan tetapi, Cohen menilai bahwa walaupun terdengar tidak adil, mata uang internasional memang diperlukan, karena bertransaksi dengan mata uang yang berbeda-beda membuat kegiatan ekonomi menjadi tidak efektif.¹⁹ Sama seperti Cohen, Ronald I. McKinnon dalam bukunya yang berjudul *The Unloved Dollar Standard: From Bretton Woods to the Rise of China* juga menilai bahwa kemunculan mata uang tertentu sebagai *monetary hegemon* merupakan sifat alami dari sistem moneter internasional.²⁰ Hegemoni mata uang ini sendiri sulit untuk digantikan, karena peralihan dari satu mata uang ke mata uang lainnya membutuhkan biaya yang besar, terutama untuk melakukan penyesuaian terhadap

¹⁹ *Ibid.*, 9–14.

²⁰ Ronald I. McKinnon, *The Unloved Dollar Standard: From Bretton Woods to the Rise of China* (New York: Oxford University Press, 2013), 6.

mata uang yang baru. Tak hanya itu, jika aktor-aktor pada pasar internasional lainnya tidak turut mengubah mata uang mereka ke mata uang yang baru, perubahan ini hanya akan mempersulit kegiatan perekonomian internasional. Maka dari itu, hal ini memberikan keistimewaan tambahan bagi *first mover* atau negara yang mata uangnya terlebih dahulu menyanggah status sebagai mata uang internasional, seperti AS.

Di tengah dominasi AS sebagai *monetary hegemon*, negara-negara lain—dalam hal ini mereka yang tidak memiliki hak istimewa sebagai mata uang internasional—perlu mengatur strategi untuk tetap memaksimalkan keuntungan mereka pada sistem moneter internasional. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Kebijakan moneter sendiri merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk memengaruhi laju dan arah perekonomian suatu negara, agar berjalan sesuai dengan harapan. Benjamin M. Friedman menyebutkan bahwa utamanya, kebijakan moneter ditujukan untuk memelihara tingkat harga pada suatu negara, dengan harapan dapat mencegah inflasi ataupun deflasi.²¹ Selain itu, kebijakan moneter juga umumnya dirumuskan dengan tujuan-tujuan lain, seperti memaksimalkan produksi dan membuka lapangan kerja, memelihara keseimbangan pada neraca perdagangan internasional negara tersebut, mempertahankan stabilitas pasar finansial, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Eduardo Levy Yeyati dan Federico Sturzenegger menyebutkan bahwa kebijakan moneter umumnya menargetkan pengelolaan

²¹ B. M. Friedman, “Monetary Policy,” dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, ed. Neil J. Smelser dan Paul B. Baltes (Elsevier Ltd., 2001), 9976–84, 9977.

terhadap sejumlah aspek, di antaranya yaitu nilai tukar mata uang, agregat moneter, serta tingkat inflasi di negara tersebut.²² Dalam implementasinya, kebijakan moneter umumnya ditujukan untuk memastikan agar nilai tukar mata uang, agregat moneter, ataupun tingkat inflasi negara tersebut berada pada tingkat yang diharapkan. Dengan fokusnya pada tingkat harga dan sirkulasi uang, maka pemerintah pun umumnya mendelegasikan tugas-tugas terkait kebijakan moneter kepada bank sentral.

Dalam mengelola nilai tukar, bank sentral umumnya menggunakan tingkat suku bunga sebagai instrumen.²³ Bank sentral memiliki wewenang untuk menaikkan ataupun menurunkan tingkat suku bunga agar memengaruhi daya tarik mata uang tersebut terhadap investor. Tingkat suku bunga yang tinggi umumnya dapat menarik arus modal untuk masuk, sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut pun meningkat, dan berpotensi untuk menguatkan nilai tukar mata uang tersebut. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang rendah dapat meminimalkan arus modal masuk, sehingga permintaan terhadap mata uang tersebut berkurang. Selain itu, bank sentral juga dapat melakukan intervensi—khususnya pada perekonomian dengan sistem mengambang terkendali, yakni dengan membeli ataupun menjual mata uangnya sendiri. Jika bank sentral menilai bahwa mata uangnya mengalami fluktuasi secara berlebihan, bank sentral dapat menjual mata uangnya dan membeli mata uang asing untuk melemahkan nilai tukar mata uangnya. Sebaliknya, jika bank

²² Eduardo Levy Yeyati dan Federico Sturzenegger, “Monetary and Exchange Rate Policies,” dalam *Handbook of Development Economics*, ed. Dani Rodrick dan M. R. Rosenzweig (Elsevier, 2009), 4215–81, 4220.

²³ B. M. Friedman, “Monetary Policy,” dalam *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, ed. Neil J. Smelser dan Paul B. Baltes (Elsevier Ltd., 2001), 9976–84, 9979.

sentral ingin memperkuat nilai tukar mata uangnya, maka bank sentral dapat membeli mata uangnya sendiri dan menjual cadangan mata uang asing yang dimiliki.

Selain kebijakan moneter, langkah lain yang diambil negara-negara untuk memitigasi dominasi AS sebagai *monetary hegemon* adalah dengan mewujudkan kooperasi antar negara. Dalam konteks ekonomi politik internasional, kooperasi sendiri dapat diartikan sebagai penyesuaian kebijakan nasional antara negara yang satu dengan negara lainnya terkait suatu isu tertentu secara timbal balik.²⁴ Penyesuaian kebijakan ini umumnya dapat dicapai melalui proses negosiasi antar negara, baik secara implisit maupun eksplisit.

Dalam bukunya, Cohen menyebutkan bahwa kerja sama moneter melalui penyesuaian kebijakan memiliki dua tujuan utama. Pertama, kerja sama dalam bidang moneter dapat dimanfaatkan sebagai sarana bagi negara untuk mencapai kepentingannya masing-masing.²⁵ Dengan kata lain, negara-negara melakukan penyesuaian kebijakan agar tidak menjadi “penghalang” bagi satu sama lain untuk mencapai kepentingan moneternya masing-masing. Di sisi lain, penyesuaian kebijakan juga dapat ditujukan untuk mencapai kepentingan kolektif. Kepentingan kolektif ini sendiri dapat berupa pembentukan institusi moneter untuk memitigasi dampak dari guncangan ekonomi atau politik, ataupun perwujudan integrasi ekonomi regional.

²⁴ Benjamin J. Cohen, “The Triad and the Unholy Trinity: Problems of International Monetary Cooperation,” dalam *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*, ed. Jeffrey A. Frieden dan David A. Lake (London: Routledge, 1999), 245–56, 246.

²⁵ *Ibid.*, 247.

Secara spesifik, kerja sama moneter dalam konteks mata uang menggarisbawahi bagaimana kooperasi dalam hal mata uang dapat dijadikan instrumen untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Dalam bukunya yang berjudul *Currency Cooperation in East Asia*, Frank Rövekamp dan Hanns Günther Hilpert memaparkan bahwa kerja sama berupa penyesuaian kebijakan terkait mata uang dapat memitigasi dampak dari instabilitas nilai tukar.²⁶ Hal ini terutama penting bagi negara-negara dengan kedekatan geografis. Selain untuk memitigasi krisis, nilai tukar yang stabil juga dapat mendorong peningkatan perdagangan intra-regional, sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi regional pada kawasan tersebut.

Salah satu bentuk kerja sama moneter yang dilakukan oleh negara-negara pada masa kini adalah kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan ataupun transaksi ekonomi lainnya dalam ranah internasional. Dalam tulisannya yang berjudul “Use of National Currencies for Trade Settlement in East Asia: A Proposal”, Il-houng Lee dan Yung-chul Park memberikan pemaparan terkait faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dari pembentukan suatu kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional.²⁷ Lee dan Park mengungkapkan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mendukung keberhasilan dari sistem ini. Yang pertama adalah bahwa penggunaan mata uang harus merupakan pilihan ekonomis eksportir, dan bukan sekedar perintah dari bank sentral. Kedua, kerangka kerja sama ini harus memiliki

²⁶ Frank Rövekamp dan Hanns Günther Hilpert, *Currency Cooperation in East Asia* (New York: Cham Springer International Publishing, 2014), 2–13.

²⁷ Il-houng Lee dan Yung-chul Park, “Use of National Currencies for Trade Settlement in East Asia: A Proposal,” *ADB Working Paper* 474 (13 April 2014), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2495181>, 19.

sebuah sistem kliring dan penyelesaian transaksi. Ketiga, kerangka kerja sama ini juga harus dilengkapi dengan pasar valuta asing antar-bank untuk memfasilitasi jual-beli mata uang secara langsung oleh negara-negara anggota. Keempat, kerangka kerja sama ini perlu menyediakan sarana bagi eksportir untuk menginvestasikan pemasukannya pada aset-aset di negara mitra, dan terakhir, kerangka kerja sama ini harus memiliki mekanisme penyesuaian perihal ketidakseimbangan dalam kepemilikan mata uang asing.

Pertama-tama, Lee dan Park menekankan bahwa pemilihan mata uang harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari eksportir dan importir, tanpa campur tangan dari pemerintah.²⁸ Lee dan Park kemudian juga menyebutkan bahwa dalam memilih mata uang, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada perkiraan fluktuasi nilai tukar mata uang dari negara mitra, biaya lindung nilai atau *hedging*, dan yang terutama yaitu konvertibilitas dari mata uang lokal yang diajukan. Umumnya, eksportir sendiri lebih memilih untuk menerima pembayaran dalam mata uang yang dapat sepenuhnya ditukarkan atau *fully convertible*, karena dapat diterima secara luas dan lebih mudah untuk ditukarkan di pasar mata uang global.

Faktor kedua adalah ketersediaan sistem kliring dan penyelesaian transaksi.²⁹ Lee dan Park menyebutkan bahwa sistem kliring dan penyelesaian transaksi yang ideal adalah sistem *multicurrency* yang dapat melayani fungsi kliring dan penyelesaian transaksi dalam seluruh mata uang yang digunakan dalam sistem tersebut. Sistem kliring dan penyelesaian transaksi yang dimaksud Lee dan Park

²⁸ *Ibid.*, 20.

²⁹ *Ibid.*

sendiri terdiri atas suatu jaringan bank-bank kliring yang dibentuk di seluruh negara yang berpartisipasi. Bank-bank kliring ini kemudian memfasilitasi bank-bank lokal untuk dapat memberikan layanan kliring, meliputi pembukaan rekening untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal dengan negara mitra, transaksi deposito dan penarikan tunai, remitansi, serta penyelesaian transaksi investasi di seluruh negara yang tergabung dalam sistem ini. Kemudian, bank-bank ini juga bertanggung jawab atas manajemen risiko dari seluruh bank lokal di bawahnya, serta memimpin koordinasi agar bank-bank lokal dapat menjalankan fungsinya dengan sesuai.

Faktor ketiga menurut Lee dan Park adalah adanya pasar valuta asing antar-bank.³⁰ Di satu sisi, jaminan konvertibilitas serta sistem kliring dan penyelesaian transaksi yang efisien merupakan dua aspek yang krusial dalam mendasari pembentukan sistem transaksi internasional dengan mata uang lokal. Akan tetapi, Lee dan Park juga menekankan pentingnya pembentukan sebuah *interbank foreign exchange market* atau pasar valuta asing antar-bank yang mampu memfasilitasi kegiatan jual-beli mata uang secara langsung untuk melengkapi sistem tersebut. Dengan adanya pasar ini, kegiatan jual-beli mata uang dapat berlangsung dengan lebih cepat dan biaya yang perlu dikeluarkan juga lebih rendah, karena kegiatan jual-beli dapat dilakukan secara langsung tanpa pihak perantara.

Faktor keempat adalah ketersediaan sarana bagi eksportir untuk melakukan investasi dalam mata uang negara mitra.³¹ Lee dan Park menyatakan bahwa diperlukan suatu instrumen investasi yang dibuat secara khusus untuk eksportir dari

³⁰ *Ibid.*, 20–21.

³¹ *Ibid.*, 21.

negara mitra, agar eksportir dapat menginvestasikan devisa yang diperoleh dalam mata uang negara mitra ke dalam aset-aset di negara tersebut. Sarana ini dapat diatur oleh negara yang bersangkutan, meliputi apa saja aset yang dapat diinvestasikan secara khusus di dalam mekanisme ini, dan *return* yang akan didapatkan oleh para eksportir dari kepemilikan atas aset-aset tersebut.

Kemudian, faktor terakhir dari Lee dan Park adalah adanya mekanisme penyesuaian untuk ketidakseimbangan dalam kepemilikan mata uang asing.³² Menurut Lee dan Park, hal ini diperlukan karena terdapat potensi bahwa dalam melakukan perdagangan bilateral, salah satu negara akan mengalami defisit, yang menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan mata uang. Sebagai contoh, apabila Indonesia mengalami defisit dalam perdagangan bilateral dengan Malaysia, eksportir Malaysia kemungkinan akan memiliki lebih banyak rupiah daripada yang diinginkan. Hal ini berpotensi untuk mengganggu stabilitas pasar valuta asing di antara kedua negara, sehingga diperlukan mekanisme untuk menanggulangi hal ini. Lee dan Park menawarkan dua mekanisme, pertama yaitu negara perlu menetapkan batas atas atau limit dari penggunaan masing-masing mata uang dalam penyelesaian transaksi. Meskipun importir tidak seharusnya diberikan larangan untuk menggunakan mata uang tertentu, Lee dan Park berargumen bahwa hal ini diperlukan untuk mencegah dampak yang mungkin terjadi dari situasi ini. Kemudian, mekanisme yang kedua adalah dengan membentuk perjanjian swap mata uang secara bilateral. Dalam mekanisme ini, apabila salah satu negara mengalami defisit, maka negara tersebut dapat menggunakan uang dalam mata

³² *Ibid.*, 21–22.

uang negara mitranya yang diperoleh dari perjanjian swap tersebut untuk bertransaksi, sehingga menyeimbangkan pergerakan mata uang kedua negara.

Selain Lee dan Park, Chalongphob Sussangkarn juga memiliki argumennya sendiri terkait faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari sebuah kerangka kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam memfasilitasi transaksi internasional. Pada tulisannya yang berjudul “Promoting Local Currency Usage in the Region”, beliau menyebutkan bahwa penggunaan mata uang lokal pada tingkat internasional hanya akan berhasil apabila sistem yang diimplementasikan mampu meminimalkan biaya transaksi semaksimal mungkin.³³ Sussangkarn kemudian menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang perlu dipenuhi untuk dapat menurunkan biaya transaksi dalam mata uang lokal, yakni dengan menekan selisih antara kurs jual dan beli melalui pembentukan *direct foreign exchange market*, serta memastikan adanya tingkat likuiditas dan tingkat perputaran mata uang yang cukup untuk masing-masing mata uang yang digunakan.

Pertama-tama, Sussangkarn menekankan pada pentingnya mempersempit selisih antara kurs jual dan kurs beli masing-masing mata uang, atau dengan kata lain memastikan bahwa *spread* dari masing-masing mata uang tidak terlalu lebar.³⁴ *Spread* yang besar akan merugikan pelaku perdagangan internasional, sehingga umumnya mata uang dengan *spread* yang lebar tidak begitu diminati. Maka dari itu, agar kerangka kerja sama ini dapat berhasil, setidaknya *spread* mata uang lokal pada mekanisme ini harus lebih rendah dari *spread* mata uang lainnya. Sussangkarn

³³ Chalongphob Sussangkarn, “Promoting Local Currency Usage in the Region,” *Asian Economic Papers* 19, no. 2 (Juni 2020): 1–16, https://doi.org/10.1162/asep_a_00768, 11.

³⁴ *Ibid.*

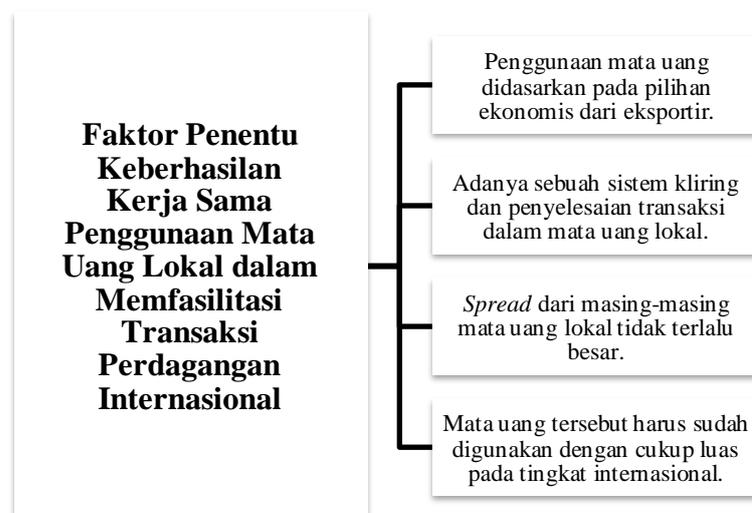
pun menyebutkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil *spread* mata uang lokal adalah melalui pembentukan *direct foreign exchange market* atau pasar jual-beli mata uang langsung—serupa dengan *interbank foreign exchange market* yang disebutkan oleh Lee dan Park. Menurut Sussangkarn, dengan melakukan transaksi jual-beli mata uang secara langsung di bawah mekanisme pasar, maka *spread* dapat ditekan. Hal ini dikarenakan kurs jual dan beli yang ditetapkan di dalam pasar ini bebas dari komisi dan biaya lainnya, yang umumnya harus dibayarkan apabila membeli mata uang asing dari broker atau pihak ketiga lainnya.

Kemudian, faktor kedua yang ditekankan oleh Sussangkarn adalah tingkat likuiditas dan tingkat perputaran mata uang yang cukup untuk menunjang penggunaan mata uang lokal pada tingkat internasional secara lebih luas.³⁵ Dengan kata lain, mata uang yang dipilih harus sudah digunakan secara luas pada tingkat internasional. Umumnya, mata uang lokal yang belum banyak digunakan pada ranah internasional sendiri memiliki tingkat likuiditas dan perputaran yang rendah karena jarang digunakan di luar kepentingan domestik. Maka dari itu, Sussangkarn menekankan bahwa agar kerangka kerja sama ini dapat berhasil, negara dan bank sentral perlu terlebih dahulu memantik tingkat likuiditas dan pergerakan mata uang tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan, agar stabilitas dari nilai tukar mata uang lokal tersebut terjaga. Dengan stabilitas yang baik, maka mata uang lokal tersebut pun akan lebih menarik untuk digunakan oleh pelaku ekonomi internasional.

³⁵ *Ibid.*

Dari pemaparan Lee dan Park serta Sussangkarn perihal faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari kerangka kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional, penulis dapat merumuskan empat faktor utama yang dapat mendukung keberhasilan dari sistem ini. Faktor pertama adalah bahwa mata uang yang digunakan harus merupakan pilihan ekonomis dari eksportir, dan bukan hanya suruhan dari pemerintah ataupun bank sentral. Kedua, diperlukan adanya sistem kliring dan penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal yang dapat menunjang seluruh kegiatan transaksi yang difasilitasi oleh kerangka kerja sama tersebut. Ketiga, perlu dipastikan bahwa selisih antara kurs jual dan beli atau *spread* dari masing-masing mata uang yang digunakan dalam kerangka kerja sama ini tidak terlalu lebar. Terakhir, mata uang yang dipilih juga harus telah digunakan secara cukup luas pada tingkat internasional.

Bagan 1.1 Faktor Penentu Keberhasilan Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Memfasilitasi Transaksi Perdagangan Internasional



Sumber: Ilustrasi penulis

Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa mata uang yang digunakan merupakan pilihan ekonomis dari eksportir. Hal ini dikarenakan eksportir merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam aktivitas perdagangan internasional, sehingga apabila terdapat perubahan terkait mata uang yang digunakan, eksportir akan menjadi pihak-pihak yang mengeksekusi perubahan tersebut, serta menjadi pihak-pihak yang merasakan dampak dari perubahan tersebut secara langsung. Oleh karena itu, kesediaan eksportir untuk mengimplementasikan perubahan tersebut menjadi faktor yang amat krusial dalam menentukan keberhasilan dari kerangka kerja sama ini—dan kesediaan ini tidak akan hadir apabila mata uang yang digunakan tidak sesuai dengan pilihan ekonomis eksportir.

Kedua, pentingnya sistem kliring dan penyelesaian transaksi mata uang lokal dalam kerja sama ini tidak bisa diabaikan. Sistem kliring sendiri mengacu pada mekanisme atau infrastruktur yang memfasilitasi penyelesaian transaksi internasional dalam mata uang tertentu. Sistem kliring ini berfungsi sebagai perantara antara institusi keuangan, termasuk bank sentral, dan pelaku ekonomi internasional lainnya yang melakukan transaksi dalam mata uang tersebut. Dengan adanya sistem kliring dan penyelesaian transaksi ini, maka transaksi perdagangan internasional dalam mata uang lokal pun dapat dilakukan dengan lebih aman, cepat, mudah, dan efisien.

Ketiga, perlu dipastikan bahwa *spread* dari masing-masing mata uang tidak terlalu besar. Agar para eksportir tertarik menggunakan mata uang lokal untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional, kerja sama ini harus

menawarkan pengalaman bertransaksi yang lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan mata uang dari pihak ketiga. Efisiensi ini mencakup biaya transaksi yang rendah, lebih rendah daripada menggunakan mata uang lain. Efisiensi inilah yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari kerja sama ini, karena jika mata uang lokal tidak mampu menawarkan *spread* yang lebih rendah, maka para eksportir—selaku pebisnis yang berorientasi pada keuntungan—tidak akan melihat adanya manfaat yang cukup berarti dari kerangka kerja sama ini.

Faktor penentu terakhir adalah bahwa mata uang ini harus sudah digunakan dengan cukup luas pada tingkat internasional. Hal ini dikarenakan mata uang yang digunakan secara luas—terutama oleh pelaku ekonomi asing—mencerminkan mata uang yang stabil, dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi internasional terhadap mata uang tersebut. Dengan kata lain, mata uang ini harus memiliki citra yang baik di mata internasional, dan citra ini dibangun melalui penggunaan secara luas pada tingkat internasional. Tanpa citra yang baik, maka pelaku ekonomi asing pun enggan untuk bertransaksi dengan mata uang ini, karena dianggap tidak stabil dan terlalu berisiko.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* mengartikan penelitian kualitatif sebagai sebuah metode penelitian yang memfokuskan pada makna dan

pemahaman dari suatu fenomena.³⁶ Penelitian dengan metode ini bergantung pada data-data non-numerik—dalam hal ini data-data berbentuk tulisan dan data non-tekstual seperti gambar, artefak sosial, dan lain sebagainya. Data dalam penelitian kualitatif sendiri dapat bersifat primer, yaitu dokumen asli yang ditulis oleh pihak-pihak yang memiliki akses langsung terhadap informasi yang digambarkan atau mengalami peristiwa secara langsung, ataupun data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak yang tidak hadir secara langsung di tempat kejadian.³⁷

Dengan memfokuskan penelitian pada kerja sama LCS antara Indonesia dan Malaysia, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatif. Pertama-tama, penelitian ini terlebih dahulu mendeskripsikan urgensi yang mendorong Indonesia dan Malaysia untuk mendorong penggunaan mata uang lokalnya. Kemudian, penelitian ini dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kerja sama LCS yang terjalin di antara Indonesia dan Malaysia. Setelah itu, dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara eksplanatif.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data sekunder non-numerik. Data yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti dokumen yang dipublikasikan oleh pemerintah, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga pemerintah seperti bank

³⁶ John W Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2018), 32.

³⁷ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 67–69.

sentral dan/atau lembaga resmi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data berbentuk kajian literatur seperti buku dan artikel jurnal, serta artikel-artikel berita ataupun hasil wawancara yang dipublikasikan di situs-situs daring. Penelitian ini kemudian mengolah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut untuk memberikan gambaran mengenai kerja sama LCS antara Indonesia dan Malaysia, dan permasalahan yang mengakibatkan rendahnya implementasi dari kerja sama ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab. Kelima bab tersebut dibagi dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan. Pendahuluan ini mencakup latar belakang dari masalah yang diangkat, identifikasi masalah—termasuk di dalamnya deskripsi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan penelitian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan dari skripsi ini.

Bab II berisi pembahasan terkait Indonesia dan Malaysia selaku dua aktor yang terlibat dalam kerja sama ini. Bab II terlebih dahulu dibuka dengan pemaparan mengenai urgensi Indonesia dalam meningkatkan penggunaan mata uang lokalnya pada tingkat internasional, dan dilanjutkan dengan urgensi yang sama dari perspektif Malaysia. Kemudian, pembahasan pada bab II dilanjutkan dengan pemaparan mengenai hubungan yang sebelumnya sudah terjalin antara Indonesia

dan Malaysia, secara spesifik hubungan kerja sama dalam bidang perdagangan dan moneter.

Kemudian, bab III memberikan gambaran mengenai kerangka kerja sama LCS secara umum. Pertama-tama, bab ini terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait latar belakang dari pembentukan kerja sama LCS, dan kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari pembentukan kerja sama tersebut. Lalu, pembahasan dalam bab ini juga memberikan pemaparan terkait fitur-fitur utama yang ditawarkan oleh kerja sama LCS. Terakhir, bab III memaparkan mengenai mekanisme transaksi perdagangan dengan menggunakan kerja sama LCS itu sendiri.

Pada bab IV, penelitian ini mulai menganalisis kerangka kerja sama LCS antara Indonesia dengan Malaysia. Bab IV terlebih dahulu dibuka dengan pemaparan mengenai perkembangan dari kerangka kerja sama LCS antara Indonesia dan Malaysia, sejak awal penandatanganannya hingga perkembangan terakhir pada tahun 2021. Setelah itu, pembahasan berlanjut pada pelaksanaan kerja sama LCS antara Indonesia dengan Malaysia. Terakhir, bab IV kemudian memaparkan hasil yang ditemukan dari analisis terkait permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama LCS untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

Bab V sebagai penutup diisi dengan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.